



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SOEKARWO  
Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 16 Januari 2017

Menyetujui

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Soekarwo'.

**Dr. H. SOEKARWO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	1 Persentase penduduk yang bekerja	95.98
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3.97
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	3 Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	72.31
3	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	4 Angka rata-rata lama sekolah	8.9
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97.99
		6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86.82
		7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62.94
		8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112.93
		9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	102.52
		10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	81.17
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86.74
5	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah $\geq$ Sarjana/ Pasca Sarjana	71.34
6	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina	
		14 Persentase atlet berprestasi yang dibina	
7	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	15 Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	2.952
8	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	16 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	97.20
		17 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	23.87
9	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	18 Angka Harapan Hidup (AHH)	70.94
10	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	19 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	20 Cakupan KB aktif	66
12	Menurunnya persentase penduduk miskin	21 Persentase penduduk miskin	11.21
13	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	22 Persentase penurunan PMKS	1.45
14	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	120
		24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69.61
		25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.62
15	Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi	26 Rasio PDRB UMKM terhadap total PDRB (%)	54.94
16	Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	27 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	9.50
17	Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	28 Rasio perputaran modal Kopwan	2.3
		29 Prosentase koperasi aktif	80.43
18	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)	30 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)	2.07
		31 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	2.4
		32 Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4.63
		33 Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	7.0
		34 Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%)	5
19	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat ( <i>food availability</i> )	35 Ketersediaan pangan (ton)	
		- Beras	7.819.486
		- Jagung	6.571.336
		- Kedelai	500.225
		- Daging	371.933
		- Telur	362.782
		- Susu	424.482
		- Ikan	1.546.860
- Gula	1.336.770		
20	Meningkatnya penyerapan pangan ( <i>food utilization</i> )	36 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85.50
		37 Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	83.70
		38 Tingkat keamanan pangan (%)	82.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Meningkatnya akses pangan (food access)	39 Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)	< 10
22	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	40 Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	10.08
23	Meningkatnya kontribusi sektor industri	41 Pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	6.8
24	Meningkatnya kunjungan wisata	42 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	394.430
		43 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	50.812.946
25	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	44 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	215
		45 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	80
26	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah	46 Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	68.22
		47 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	52.84
		48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	45.33
		49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	46.99
		50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)	103.24
27	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara	51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)	96.42
		52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)	58.86
		53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	-
		54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	-
		55 Prosentase Kab/ Kota berpredikat Wahana Tata Nugraha	55.00
		56 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	81.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	57 Persentase tingkat pelayanan air bersih (%)	64.96
		58 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah (%)	66.97
		59 Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)	82.87
		60 Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)	86.38
		61 Persentase rusun terbangun	53.96
29	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	62 Luas areal layanan irigasi (ha)	2.055.362
		63 Rasio/ kinerja jaringan irigasi	39
		64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	72
		65 Penurunan luas genangan banjir	31
30	Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	66 Rasio ketersediaan listrik	73.03
		67 Persentase rumah tangga pengguna listrik	99.62
31	Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi	68 Luas konservasi kawasan hutan (ha)	10.000
32	Meningkatnya sumber mata air terkonservasi	69 Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	15
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut	70 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	34
34	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	71 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO <sub>2</sub> )	4
35	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	72 Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	79.49
		73 Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota	7
		74 Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	45
		75 Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	75
36	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	76 Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	21

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
37	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	77 Hasil EKPPD	ST
38	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	78 Penilaian SAKIP	A
39	Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	79 Jumlah raperda inisiatif dewan	7
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	80 Opini BPK	WTP
41	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	80
42	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran	100
43	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	83 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	5.507
44	Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	84 Jumlah kerusuhan bermotif SARA	1
45	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib	85 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	100
46	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	86 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100
47	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	87 Jumlah kejadian terkait HAM	24
48	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum	88 Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar	1.113

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rupiah)</b>
<b>A. Belanja Langsung (ex. Rutin)</b>	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	297.102.783.686
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.580.059.453
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	137.576.294.270
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	71.528.813.567
<b>B. Belanja Langsung (ex. Pembangunan)</b>	
<b>1. Urusan Wajib</b>	
a) Pendidikan	
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.380.976.500
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.560.229.100
3) Program Pendidikan Menengah	1.509.097.123.500
4) Program Pendidikan Non Formal	1.489.442.900
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59.938.000.000
6) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	28.395.680.866
b) Kesehatan	
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.254.086.394
2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.001.132.000
3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.500.000.000
4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	900.000.000
5) Program Upaya Kesehatan Perorangan	1.203.240.000
6) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.822.956.500
7) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	6.645.693.000
8) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	32.811.024.000
9) Program Pengendalian Penyakit	5.617.000.000
10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	712.398.178.898
11) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2.183.538.591.666
c) Pekerjaan Umum	
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	20.377.800.000
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	944.104.713.000
3) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	33.585.000.000
4) Program Konservasi Sumber Daya Air	20.078.035.100
5) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	90.687.754.891
6) Program Pengendalian Daya Rusak Air	71.904.858.830
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	3.631.875.000
8) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	21.052.675.000
d) Perumahan	
1) Program Pengembangan Perumahan	41.429.251.000

e)	Penataan Ruang	
	1) Program Perencanaan Tata Ruang	2.006.491.000
	2) Program Pemanfaatan Ruang	1.728.547.500
	3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.492.573.500
f)	Perencanaan Pembangunan	
	1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.768.702.000
	2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4.670.650.000
	3) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	6.500.000.000
	4) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	4.200.907.400
	5) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	4.628.442.600
	6) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	4.500.000.000
	7) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	5.000.000.000
	8) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	6.500.000.000
g)	Perhubungan	
	1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	26.311.702.600
	2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	48.143.237.400
	3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	28.502.490.500
	4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	139.556.000.000
	5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.755.000.000
	6) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	51.500.000.000
	7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	125.900.000.000
	8) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	171.788.661.400
	9) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	51.000.000.000
	10) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	108.291.841.000
h)	Lingkungan Hidup	
	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	22.750.000.000
	2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.650.000.000
	3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.000.000.000
	4) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1.125.000.000
i)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	3.791.577.000
	2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	740.000.000
	3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.755.000.000
	4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	960.337.000



j)	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	1) Program Pelayanan Kontrasepsi	
	2) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	188.385.000
	3) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	126.615.000
	4) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	667.000.000
k)	Sosial	
	1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	4.160.000.000
	2) Program Pemberdayaan Sosial	4.710.000.000
	3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	4.775.000.000
	4) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.330.000.000
	5) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	3.075.000.000
	6) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	2.675.000.000
	7) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial	52.399.273.200
l)	Ketenagakerjaan	
	1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	7.095.000.000
	2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	77.650.000.000
	3) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	7.092.836.000
	4) Program Perluasan dan Penempatan Kerja	7.500.000.000
m)	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3.296.685.000
	2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	13.678.121.550
	3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	21.985.745.550
	4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	20.945.473.450
	5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	2.577.795.000
	6) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	9.456.054.450
n)	Penanaman Modal	
	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4.681.338.400
	2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.889.000.000
	3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	278.872.600
	4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	9.400.000.000
	5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.200.000.000
o)	Kebudayaan	
	1) Program Pengembangan Nilai Budaya	13.998.995.000
	2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	25.319.394.500
	3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	50.433.255.000

p)	Kepemudaan dan Olah Raga	
1)	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	6.393.833.450
2)	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	10.227.608.550
q)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	475.000.000
2)	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	500.000.000
3)	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	750.000.000
4)	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.250.000.000
5)	Program Perbaikan Proses Politik	250.000.000
6)	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	275.000.000
7)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	930.993.250
8)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	829.006.750
9)	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	440.000.000
10)	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.590.220.400
11)	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	965.273.200
12)	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.827.419.300
13)	Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	74.984.400
r)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1)	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	15.047.081.040
2)	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1.212.500.000
3)	Program Peningkatan Kerjasama	687.936.000
4)	Program Pembentukan Produk Hukum	3.717.734.000
5)	Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum	2.289.680.000
6)	Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum	1.834.695.000
7)	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	23.751.904.000
8)	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	17.614.525.900
9)	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA	1.650.000.000
10)	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	6.550.000.000
11)	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	25.237.951.000
12)	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	2.881.160.000
13)	Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi	8.269.804.000
14)	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	3.201.171.120
15)	Program	
16)	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	825.000.000
17)	Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	673.225.000
18)	Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik	2.442.395.000

19) Program Dukungan Pelayanan Umum	1.424.871.000
20) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	88.240.468.140
21) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.982.000.000
22) Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian	650.913.000
23) Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur	648.913.000
24) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.854.375.000
25) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	669.835.000
26) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	234.250.000
27) Program Pencegahan Korupsi	2.260.666.000
28) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	17.967.675.000
29) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	70.788.182.830
30) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	4.238.629.300
31) Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	1.034.200.000
32) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	15.656.290.000
33) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	6.560.589.000
34) Program pengembangan Data Informasi	2.161.330.000
35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.328.472.920
36) Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur	4.646.527.080
37) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.869.557.300
38) Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	6.445.000.000
39) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI	3.500.000.000
s) Ketahanan Pangan	
1) Program Peningkatan Ketahanan pangan	9.623.294.000
2) Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	3.050.000.000
3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	10.125.000.000
t) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.942.002.698
2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	3.574.286.800
3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	18.608.300.102
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	7.676.880.400
u) Kearsipan	
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1.021.000.000
2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	479.000.000

v) Komunikasi dan Informatika	
1) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	375.000.000
2) Program Pengembangan Teknologi Informatika	1.512.500.000
3) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	8.717.500.000
4) Program Pos dan Telekomunikasi	400.000.000
5) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	2.720.000.000
6) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	750.000.000
7) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	2.147.000.000
8) Program Fasilitasi KPID	800.000.000

w) Perpustakaan	
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	15.500.600.000

## 2. Urusan Pilihan

### a. Pertanian

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	57.259.353.600
2) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	58.663.315.000
3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	3.843.000.000
4) Program peningkatan Produksi Perkebunan	49.565.000.000
5) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	9.350.000.000
6) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	1.230.000.000
7) Program peningkatan Produksi Peternakan	46.567.000.000
8) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	500.000.000
9) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	3.000.000.000

### b. Kehutanan

1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	19.161.676.882
2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	6.066.183.000
3) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	586.803.118

### c. Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	3.669.731.000
2) Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas.	2.480.000.000
3) Program Pengelolaan Air Tanah.	1.880.000.000

### d. Pariwisata

1) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan	6.425.605.500
---	---------------

### e. Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya	122.065.000.000
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	334.488.788.000
3) Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	15.300.000.000
	77.750.000.000

4) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	
5) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.997.000.000
6) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	10.000.000.000
f. Perdagangan	
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	43.738.672.700
2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	21.717.634.000
3) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	11.745.301.000
g. Industri	
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	8.141.682.000
2) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	28.533.650.000
3) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.214.055.000
4) Program Peningkatan Standarisasi Industri	11.625.171.500
5) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	9.091.472.000

Surabaya, 16 Januari 2017

Menyetujui,

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**Dr. H. SOEKARWO**